

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa wisata merupakan suatu wujud terpadu antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang dipadukan dengan tata cara dan tradisi kerakyatan. (Posmaningsih, 2020a). Desa Wisata juga merupakan salah satu Tempat umum atau sarana pelayanan umum yang memiliki fasilitas dan berpotensi terhadap terjadinya penularan penyakit (Fatmawati, 2018). Kebanyakan masyarakat Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya alam terkonsentrasi di pedesaan. Desa mempunyai peranan yang sangat penting apabila masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dikaitkan dengan potensi utama keberadaan desa (Wibowo, 2013).

Toilet umum adalah ruangan yang bersih, aman, nyaman dan higienis yang dilengkapi dengan toilet, persediaan air bersih dan peralatan lainnya yang dirancang khusus untuk menyelenggarakan buang air besar dan memenuhi kebutuhan fisiologis masyarakat umum di rumah, tempat usaha dan tempat umum. psikologi sosial dan lainnya (Posmaningsih, 2020a). Dengan demikian pengguna toilet umum akan sangat beragam dan senantiasa berganti. Sebagai akibatnya, toilet merupakan tempat yang potensial sebagai sarana penyebaran penyakit bila sanitasi dan higiene-nya tidak dipelihara dengan baik (BSN & Damayanti, 2021).

Perkembangan globalisasi yang sangat pesat juga berdampak pada mobilisasi perorangan yang sangat tinggi, baik dari segi jarak travel yang semakin

beragam, juga dibarengi dengan frekuensi berpergian yang semakin tinggi. Hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan sarana umum di luar tempat tinggal, dan toilet termasuk salah satu yang terpenting (BSN & Damayanti, 2021). Pada Tahun 2006, di Indonesia telah dibentuk Asosiasi Toilet Indonesia atas prakarsa Naning Adiwoso (ATI, 2006), dan telah dicanangkan Gerakan Nasional Toilet Umum Bersih pada tanggal 17 Februari 2006. Sebagai kelanjutannya telah dua diberikan penghargaan kepada Toilet Bersih Lingkungan Bandara kepada Bandara Ngurah Rai, Denpasar pada bulan September 2007 (Harry, 2007). Menteri Kebudayaan dan Pariwisata telah berencana untuk melanjutkan penilaian terhadap kebersihan toilet tidak hanya lingkungan bandara tetapi juga ditempat-tempat wisata.

Menurut studi yang dilakukan Purnamasari tahun 2019, di Kabupaten Bantul, terdapat 80 toilet umum dengan 38 pengelola. Sebanyak delapan pengelola di wawancarai terkait dengan sanitasi toilet umum, terdapat tiga responden memiliki pengetahuan sanitasi toilet umum dan lima responden tidak mengetahui pengetahuan terkait sarana sanitasi toilet umum. Sikap pengelola ketika diwawancarai terkait sanitasi toilet umum tidak merespon untuk mencari informasi tentang sanitasi toilet umum. Pengelola toilet umum di objek wisata tersebut hanya empat mendapat sosialisasi terkait air bersih yang dipakai oleh instansi kesehatan (Purnamasari & Rangkuti, 2020)

Menurut penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, mengenai pengembangan standar sanitasi toilet desa wisata di Provinsi Bali Tahun 2020 didapatkan hasil uji coba bahwa prosentase persyaratan yang terpenuhi rata-rata dari 15 desa wisata yang dipakai uji coba adalah 64,02% dengan

range nilai 54% - 75%. Standar sanitasi toilet desa wisata tersusun menjadi empat sub yaitu bangunan, konstruksi bangunan, sanitasi, pengelolaan, dan pemeliharaan (Posmaningsih, 2020a). Berdasarkan hasil penelitian Prilan, (2018) pada seluruh toilet umum sebanyak 40 buah di obyek wisata pantai Kota Denpasar didapatkan hasil bahwa 5% tidak memenuhi syarat penyediaan air bersih, 79% tidak memenuhi syarat persyaratan ruang, seluruh toilet umum (100%) tidak memenuhi syarat sirkulasi udara dan 21% tidak memenuhi syarat pencahayaan (Prilan Cahyanti, dkk. 2018). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Muhamad Ruslan, survey yang dilakukan terhadap 20 desa wisata, terdapat 67 sarana sanitasi toilet umum yang tersebar di Kabupaten Karangasem. Setiap desa wisata memiliki ketua pengelola masing-masing yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan desa wisata yang ada di Kabupaten Karangasem (Ruslan, 2021).

Jumlah desa wisata yang ada di Provinsi Bali sebanyak 139 desa wisata. Salah satu wilayah yang berpotensi untuk mengembangkan Desa wisata di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana. Menurut SK Bupati Jembrana SK Bupati Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Penetapan Desa wisata Di Kabupaten Jembrana, terdapat 5 Desa wisata yang ada di Kabupaten Jembrana yaitu Desa Blimbingsari, Desa Ekasari, Desa Manistutu, Desa Perancak, Desa Rambut Siwi. Dari hasil survey pendahuluan diketahui bahwa belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas toilet di desa wisata. Hasil wawancara pada 30 pengunjung di Desa Wisata diketahui bahwa 18 orang (60%) menyatakan tidak puas terhadap kondisi toilet. Pada salah satu Desa Wisata, toilet tidak bisa dipergunakan karena dalam kondisi rusak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan sanitasi toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Gambaran Sanitasi Toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana Tahun 2024”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Mengetahui Manajemen Pengelolaan Toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana Tahun 2024.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi bangunan toilet di Desa Wisata Kabupaten Jembrana
- b. Mengidentifikasi konstruksi bangunan toilet di Desa Disata Kabupaten Jembrana.
- c. Mengidentifikasi sarana sanitasi toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana.
- d. Mengidentifikasi manajemen pengelolaan dan pemeliharaan toilet Desa Wisata di Kabupaten Jembrana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan lingkungan pariwisata dan kesehatan lingkungan tempat-tempat umum dalam bidang sanitasi

desa wisata khususnya fasilitas sanitasi toilet, dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang sanitasi Desa Wisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada pihak pengelola Desa Wisata dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana.
- b. Sebagai dasar inspeksi sanitasi bagi Tenaga Sanitarian Puskesmas dalam pemantauan dan pengawasan toilet di Desa Wisata.